



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2025-2026
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke	: 12
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan	: Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dan Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Alauddin Makassar
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 24 November 2025
Waktu	: Pukul 13.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II Lantai 2 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Acara	: Audiensi terkait Kebijakan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Organisasi, dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Ketua Rapat	: H. Marwan Dasopang, M.Si.
Sekretaris Rapat	: Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin
Hadir	: 1. 20 dari 42 Anggota Komisi VIII DPR RI; 2. 13 Anggota Komisi VIII DPR RI Izin; 3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI beserta Jajaran; 4. Rektor UIN Alauddin Makassar beserta Jajaran; 5. Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Alauddin Makassar.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 14.03 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Marwan Dasopang, M.Si., didampingi Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI H. Abidin Fikri, S.H., M.H., H. Singgih Januratomoko, S.K.H., M.M., H. Abdul Wachid, dan H. Anshory Siregar, Lc., sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. CATATAN RAPAT

Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar membahas **Kebijakan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar**, dapat dicatat beberapa hal sebagai berikut:

1. Presiden DEMA UIN Alauddin Makassar Muh. Zulhamdi Suhafid mempermasalahkan efisiensi anggaran di Kementerian Agama RI yang berdampak pada kegiatan kemahasiswaan di UIN Alauddin Makassar. Kegiatan kemahasiswaan di UIN Alauddin Makassar mengalami kesulitan, bahkan setelah terjadi relaksasi anggaran di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. DEMA UIN Alauddin Makassar menuntut anggaran untuk kegiatan kemahasiswaan dikembalikan seperti anggaran tahun sebelumnya.
2. Rektor UIN Alauddin Makassar Prof. Dr. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D. menyampaikan bahwa anggaran akademik dan non-akademik tahun 2025 mengalami beberapa pemblokiran sehingga tidak bisa sepenuhnya mendukung kegiatan kemahasiswaan.
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Prof. Dr. H. Suyitno, M.Ag. mengatakan kinerja Badan Layanan Umum (BLU) UIN Alauddin Makassar tergolong baik. Selain itu seluruh pendapatan dari BLU juga sudah dikembalikan seluruhnya kepada UIN Alauddin Makassar karena pemblokiran anggaran sudah dilakukan secara bertahap sehingga kegiatan kemahasiswaan dapat dilaksanakan.

4. Pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR RI menyampaikan pandangan sebagai berikut:
 - a. Perlu penegasan bahwa efisiensi anggaran di lingkungan UIN Alauddin Makassar tidak termasuk kegiatan kemahasiswaan.
 - b. Perlu dialog antara Dewan Mahasiswa dengan pihak Rektorat UIN Alauddin Makassar untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan kegiatan kemahasiswaan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.31 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,**

TTD

H. MARWAN DASOPANG, M.Si.